

BAB IV

DASAR JEPANG MENYEPAKATI *JAPAN-US DEFENCE GUIDELINES* PADA TAHUN 2015

4.1 Dinamika Hubungan antara Jepang dengan China

Hubungan Jepang dan China selalu mengalami pasang-surut yang penyebabnya secara umum berkaitan mengenai perebutan wilayah, perebutan pengaruh serta perluasan kekuasaan. Jepang dan China merupakan dua negara dikawasan Asia Timur yang berbatasan secara geografis diantara Laut Tiongkok bagian Timur. Selain memiliki kedekatan secara geografis, Jepang dan China memiliki latar belakang sejarah yang saling berkaitan. Hubungan kedua negara ini telah berlangsung panjang bahkan sebelum masa Perang Dunia II. Akan tetapi, Jepang dan China mulai terlibat dalam hubungan yang lebih kompleks ketika memasuki periode-periode Perang Dunia II.

Tabel 1.1

Dinamika Hubungan antara Jepang dan China

Dinamika Hubungan Jepang-China (1931-2012)	
Tahun	<i>Event/Peristiwa</i>
1931	<ul style="list-style-type: none">- Periode PD II, Jepang mulai melakukan invasi ke pedudukan China. Adanya tindakan provokasi dari resimen Jepang di China yang menuntut untuk segera melakukan invasi mengakibatkan insiden pemboman rel kereta api di Manchuria Selatan, China.- Invasi terjadi, Jepang mulai mendominasi dan mengeluarkan kebijakan imperialis terhadap China.- Muncul kebangkitan nasionalisme China sebagai bentuk perlawanan kepada Jepang. Sejak saat itu, Jepang dan China sering terlibat dalam berbagai insiden yang berkaitan dengan perebutan dan perluasan kekuasaan. (Cheow, 2006)
1937	<ul style="list-style-type: none">- Jepang hampir menguasai seluruh wilayah China bagian timur.- Terjadi pembantaian oleh tentara Jpang secara masal terhadap penduduk

	<p>Nanjing, China. Ada sekitar 300.000 penduduk Nanjing dibunuh oleh tentara Jepang. (Cheow, 2006)</p>
1945	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Amerika Serikat menandai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II . - Kekalahan dalam PD II membuat Jepang harus mengubah kekuasaan militer yang melekat menjadi negara militer yang pasif. - Kehancuran akibat PD II mengharuskan Jepang untuk memperbaiki hubungannya dengan negara bekas jajahan termasuk China. - Jepang dan China ditarik ke dalam dua kubu strategis yakni Amerika dan Uni Soviet. China ke dalam kubu Uni Soviet, sedangkan Jepang harus berada dalam kekuasaan Amerika Serikat. (<i>Japan Ministry of Foreign Affairs</i>, 2014). - Jepang dan China sempat terlibat ke dalam kontak ekonomi, politik dan budaya yang dilakukan secara tidak formal. Namun, upaya tersebut gagal dibangun oleh kedua negara karena adanya singgungan historis. (Wan 2016)
1972	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon mengunjungi China dalam upayanya memberikan pengaruh paham ideologi. - Kunjungan Nixon membuat perpecahan terhadap upaya pendirian politik Jepang. - Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka melakukan kunjungan diplomatik ke China dengan tujuan untuk menstabilkan hubungan antara Jepang dan China. Akan tetapi kunjungan tersebut disambut oleh demonstrasi di seluruh China. - China dan Jepang bergabung dalam <i>The Communique of the Government</i> pada 29 September 1972. Ini merupakan perjanjian kedua negara untuk mengakhiri perang yang melibatkan penggunaan kekuatan militer. (Yanin He, 2013)
1978	<ul style="list-style-type: none"> - Jepang dan China menandatangani perjanjian <i>The Sino-Japanese Peace and Friendship Treaty</i> (PFT) yang berupa perjanjian perdamaian berisi empat artikel hasil kesepakatan kedua negara (MOFA, 1978).

1979	- Jepang memperluas bantuan pembangunan atau <i>Official Development Aid</i> (ODA) untuk membantu pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial dan politik China (Spence,1989).
1982	- Jepang mengeluarkan <i>Textbook Historical Prception</i> Jepang terhadap China. Dalam <i>textbook</i> tersebut China menilai bahwa Jepang telah mengesampingkan China. (Spence, 1989)
1985	- Terjadi demonstrasi mahasiswa anti-Jepang di China pasca Jepang mengeluarkan <i>Textbook Historical Perception</i> terhadap China (Spence,1989)
1989	- Terjadi insiden Tianmen sebagai kepada pemerintahan China saat itu yang dianggap tidak stabil memimpin dalam ekonomi dan politik China. Akibat demonstrasi, sekitar 3.000 orang meninggal.Jepang bergabung dengan negara-negara Barat untuk memberikan sanksi terhadap China setelah terjadi insiden Tianmen (Spence,1989).
1995	- Perdana Menteri Jepang, Murayama Tomiichi mengajukan permintaan maaf secara pribadi kepada China atas tindakan yang dilakukan Jepang pada tahun-tahun sebelumnya (Calder & Ye, 2010). - China melakukan uji coba nuklir yang membuat Jepang merasa terancam.Jepang merespon dengan menunda bantuan ODA ke China sebagai protes atas aksi uji coba nuklir yang dilakukan China (Calder & Ye, 2010).
1996	- Jepang berselisih dengan China mengenai perebutan pulau Senkaku/Diaoyu. (Calder & Ye, 2010)
2001	- Jepang mulai memotong bantuan ODA ke China (Kato,2015).
2005	- Terjadi perebutan sumber daya gas dan minyak antar Jepang dan China di Laut China Timur, tepatnya di wilayah Senkaku/Diaoyu (Jennings,2016)
2009	- Jepang melakukan impor gas gyoza dari China. Gas tersebut beracun hingga mengakibatkan kemablinya kontroversi antar kedua negara (Jennings,2016)
2010	- Kapal nelayan China bertabrakan dengan dua kapal Penjaga Pantai Jepang di dekat pulau yang disengketakan yakni Senkaku/Diaoyu (Jennings,2016).

Hubungan antar Jepang dan China dimulai kembali dengan permasalahan mengenai perebutan pulau Diaoyu/Senkaku. Baik China maupun Jepang saling mengklaim kepulauan tersebut. Pulau Diaoyu/Senkaku menjadi perebutan kedua negara karena memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Awalnya pulau ini tidak berpenghuni, hingga pada zaman restorasi Meiji, tepatnya pada tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan survey dan hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Hingga kemudian menteri dalam negeri Jepang saat itu, Aritomo Yamagata mengajukan permintaan resmi agar pulau tersebut dimasukkan ke Jepang. Jepang kemudian secara resmi mengumumkan kepemilikan pulau tersebut pada 14 Januari 1895. China tidak menyetujui kepemilikan Jepang atas pulau tersebut. Menurut China pulau tersebut merupakan milik China sejak zaman dinasti Ming (1368-1644). Atas sengketa kepulauan tersebut, China dan Jepang sering terlibat kasus penembakan kapal laut di wilayah kepulauan Diaoyu/Senkaku (Jennings, 2016).

Memasuki kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Desember 2012, Jepang mulai memperkenalkan inisiatif baru dalam memperkuat postur keamanan. Demikian pula China yang saat itu mulai bangkit sebagai kekuatan dunia baru memasuki awal pemerintahan Presiden Xi Jinping. Pada tahun 2013, Jepang dan China berusaha memperkuat kapasitas dan peralatan militer masing-masing untuk mengamankan kontrol atas area Pulau Diaoyu/Senkaku. Ada terdapat perubahan terbaru dalam hubungan Jepang-China dibawah pemerintahan Shinzo Abe dan Xi Jinping, adalah "*China and Japan's Four Point Consensus*" yang merupakan dokumen perjanjian politik kedua negara yang disahkan pada 7 November 2014. Namun, interpretasi terhadap keempat poin tersebut berbeda dari kedua pemerintah. Pada point ketiga, pemerintah Jepang menulis bahwa kedua negara "memiliki pandangan yang berbeda" mengenai munculnya situasi tegang dalam beberapa tahun terakhir di perairan Laut China Timur, termasuk di sekitar kepulauan Diaoyu/Senkaku. Sementara pihak China menulis bahwa kedua negarasaling mengakui bahwa masing-masing negara akan menghargai "posisi yang berbeda" tersebut (Naoko Eto, 2018). Perbedaan tersebut berasal dari bagaimana masing-masing pemerintah memandang kepemilikan pulau Diaoyu/Senkaku. Jepang menegaskan "tidak ada masalah kedaulatan wilayah yang harus diselesaikan" atas pulau-pulau tersebut karena memiliki

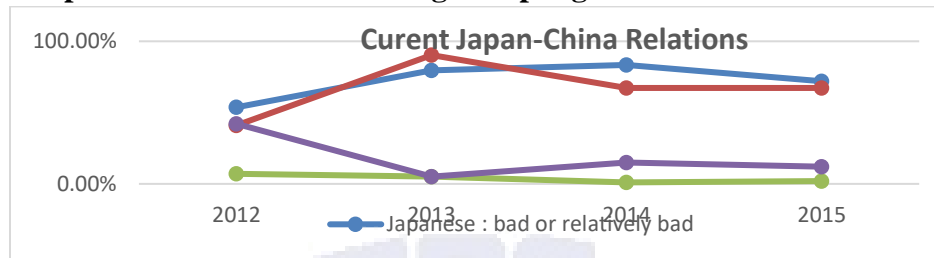
kedaulatan secara *de facto*; sedangkan China berpendapat bahwa ada perselisihan yang terjadi antar kedua negara.

Tumbuhnya kesadaran China sebagai kekuatan besar memunculkan isu baru dalam dinamika hubungan Jepang-China. Kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Kuil Yasukuni memicu pertentangan dari China. China menganggap kunjungan Abe ke Kuil Yasukuni sebagai simbol agresi militer Tokyo pada masa perang. Bahkan setelah kunjungan Abe ke kuil Yasukuni, China meluncurkan kampanye melalui media kolektif milik China yang bertujuan untuk membentuk citra Jepang kepada dunia sebagai negara yang revisionis atau negara yang dianggap menyimpang dalam tatanan internasional pada pasca perang (Naoko Eto, 2018).

Pada November 2014, Perdana Menteri Abe dan Presiden Xi mengadakan pertemuan puncak pertama dengan China untuk membahas kerjasama ekonomi. Hubungan Jepang-China sejak 2014 perlahan-lahan condong ke arah perbaikan. Kedua negara berusaha memperbaiki hubungan dalam serangkaian negosiasi. Namun hanya sampai pada proses negosiasi dan tidak mencapai suatu kesepakatan bersama, Jepang dan China kembali terlibat dalam perebutan pulau Diaoyu/Senkaku. Menurut Shinzo Abe, China telah berupaya untuk melakukan tindakan agresi dengan mengancam negara mitranya yakni Jepang. Hingga pada tahun 2015 belum ada kesepakatan antar kedua negara dalam perebutan pulau Daiyou/Senkaku. Meski pada tanggal 16 Maret 2015, Jepang dan China sempat melakukan perundingan keamanan tingkata tinggi atas perebutan pulau tersebut, tidak ada satu kesepakatan yang mengakhiri pertikaian kedua negara dalam perebutan pulau Diaoyu/Senkaku. Selain itu, ketidaksepakatan mendasar kedua negara ini yakni mengenai status keberadaan Taiwan. Bahkan Presiden Xi menyatakan bahwa Sejarah dan Posisi Taiwan adalah masalah utama dalam upaya membangun hubungan politik China dan Jepang. Xi meminta Jepang seharusnya mengikuti prinsip yang terkandung dalam "*China and Japan's Four Point Consensus*" terkait penanganan masalah Taiwan (Naoko Eto, 2018).

Hubungan kedua negara kembali mengalami kemunduran dalam kisaran tahun 2012 hingga tahun 2015 yang sebagian besar diperhadapkan oleh kendala yang sama yakni masalah kedaulatan pulau Diaoyu/Senkaku. Akibatnya saling ketidakpercayaan antar publik muncul dari kedua negara, seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1.2 dalam survey oleh salah satu badan non-profit di Jepang terhadap responden publik atas hubungan Jepang-China tahun 2012-2015:

Grafik 1.2
Responden Publik atas Hubungan Jepang-China Periode 2012-2015



Sumber : Analysis Paper, 2018, *Japan-China Public Opinion Survey*, The Genron NPO. Halaman 09. Data diakses dan diolah dari : <http://www.genron-npo.net/en/archives/181011.pdf>.

Hubungan Jepang-China sejak masa perang dunia II hingga tahun 2015 mengalami pasang-surut. China yang pada masa pasca PD II sebagai negara bekas imperialisme Jepang harus berusaha menyaingi posisi Jepang yang disokong oleh Amerika Serikat. Hubungan kedua negara semakin memanas memasuki masa pecah perang dingin dengan adanya perbedaan pandangan sejarah dari kedua negara. Meski sempat ada kerjasama dari kedua negara, namun sulit bagi Jepang dan China untuk menjadi negara mitra yang sependapat. Memasuki tahun 2000an, Perebutan pulau Diaoyu/Senkaku serta perbedaan penafsiran dalam pemanfaatan pulau tersebut menjadi masalah baru perselisihan kedua negara. Ketegangan konstan atas kedaulatan *de facto* Jepang terhadap pulau Diaoyu/Senkaku membuat kedua negara masih terlibat dalam konflik. Meski Jepang dan China telah berulang kali melakukan upaya kerjasama diplomatik untuk menghindari ketegangan antar kedua negara, namun sampai saat ini masih belum ditemukan jalan tengah bagi kedua negara untuk mencapai satu kesepakatan perjanjian damai.

1.2 Peningkatan Militer China di Era XI Jinping Pada Tahun 2013-2015

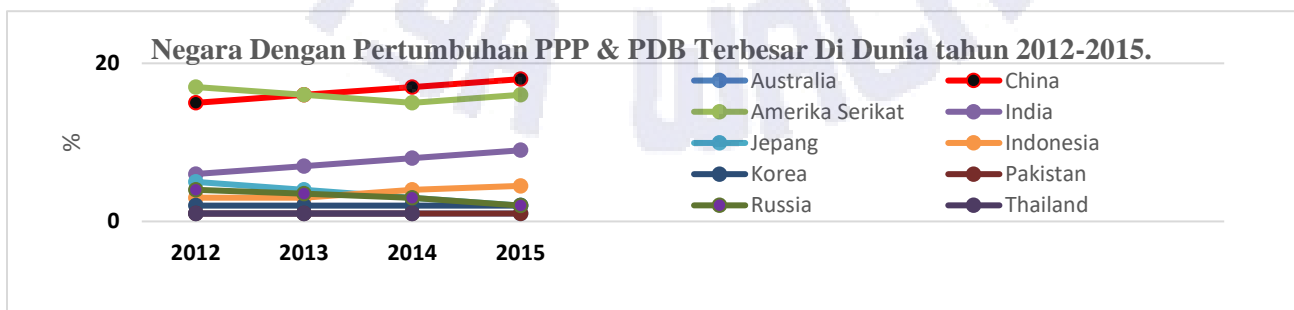
China merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah peradaban tertua dengan perkembangan yang pesat di dunia. Bahkan saat ini China menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan serta pengaruh besar secara global. Meski China mengalami periode masa penurunan di abad ke-19 dan awal abad ke-20, dalam beberapa dekade terakhir China mengalami kebangkitan baik secara ekonomi dan militer. Pada tahun 1989 China harus mengalami pengucilan dalam hubungannya dengan negara-negara besar di dunia setelah adanya insiden Tiananemen dan krisis Selat Taiwan 1995 hingga tahun 1996. Pengucilan yang terjadi pada China semakin memperkuat pandangan bahwa negara tersebut telah menjadi negara dengan kekuatan global ketika adanya kebangkitan ekonomi dan militer.

Sebagai negara dengan kekuatan populasi terbesar di dunia, China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang selalu mengalami pertumbuhan. Selain itu, China juga merupakan negara dengan kekuatan militer yang mengalami peningkatan. China mampu mengalokasikan peningkatan jumlah anggarannya untuk modernisasi militer. Dalam pertumbuhan ekonomi, China terus mengalami peningkatan PDB dari akhir tahun 1970an yakni mencapai 10% pertahun. Sejak saat itu, China telah berperan penting dalam kekuatan ekonomi baik regional maupun global (Enrico Fels, 2017).

Keberhasilan China dalam pertumbuhan ekonominya telah membawa negara ini hadir sebagai kekuatan baru bagi dunia yang dianggap berbagai negara mampu mengalahkan Amerika Serikat. Selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, Pembangunan China telah berjalan tiga hingga empat kali lebih cepat dibanding dengan pembangunan ekonomi negara lainnya. Bahkan peningkatan PDB perkapita China sejak tahun 1980 meningkat lebih dari tiga puluh kali dan menjadi yang paling dibutuhkan oleh banyak negara maju di dunia. China menjadi negara yang telah memainkan peran penting baik di regional maupun global karena muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi baru. Di tahun 2012, China bahkan menjadi negara penyumbang PDB terbesar di Asia yakni mencapai 37%. Bahkan Dalam Grafik 1.3, China menjadi negara dengan PDB yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Masih di tahun ini juga, ekspor China naik hingga tiga kali lipat mencapai 36% di kawasan Asia (Enrico Fels, 2017).

Grafik 1.3

Negara Dengan Pertumbuhan PPP & PDB Global Periode 2012-2015



Sumber : IMF *Estimate* 2015. Data diolah Oleh Enrico Fels, 2017, *Shifting Power in Asia-Pacific? : The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance*, Center For Global Studies, University Of Bonn, Germany. Halaman 510.

Sementara China tumbuh menjadi negara dengan kekuatan ekonomi baru di dunia, negara ini juga telah berhasil membangun kapasitas teknologi serta melakukan pengembangan sistem informasi dalam negeri. Kemajuan ekonomi China telah mendukung proses perkembangan teknologi hingga mampu membiayai pembangunan kekuatan militer negara tersebut yakni People's Liberation Army (PLA). Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang semakin kuat di dunia, China juga menjadi negara dengan pengeluaran anggaran pertahanan tertinggi kedua di dunia dan terbesar di Asia (Enrico Fels, 2017).

Sejak memasuki era kepemimpinan Presiden Xi Jinping pada sekitar tahun 2013-2015, China terus mengalami transformasi kekuatan dalam berbagai aspek. Presiden Xi Jinping dianggap menjadi pemimpin terkuat di China sejak era kepemimpinan Deng Xiaoping. Ketika Presiden Xi Jinping mulai memimpin, China fokus kepada tiga pokok utama dalam upaya pembangunan negara tersebut yakni penuntasan korupsi, reformasi militer serta kebijakan luar negeri yang lebih proaktif (Cheng Li, 2017). Tiga poin penting Presiden Xi Jinping ini membawa China menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia.

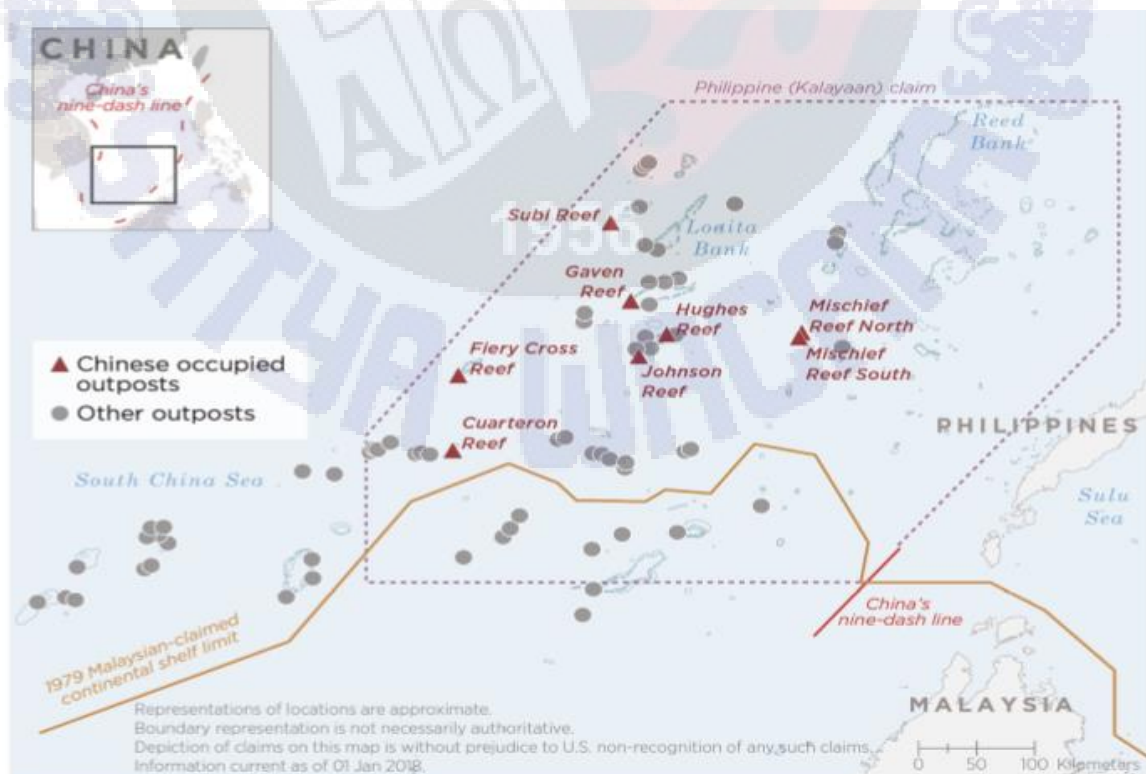
Reformasi dan inisiatif China, baik internal maupun eksternal, telah memberikan progresif atau kemajuan baru dimana niat China tidak hanya berusaha memperkuat kondisi domestiknya tetapi juga untuk mempersiapkan diri menjadinegara yang lebih kuat dari sebelumnya baik secara regional dan global. Ini terlihat dalam visi kepemimpinan China saat ini yakni Presiden Xi Jinping yang menyatakan pandangan didepan masyarakatnya bahwa China akan bangkit dan berupaya untuk membangun negara menjadi masyarakat yang makmur. Xi menyatakan bahwa Beijing sedang bersiap untuk muncul sebagai kekuatan baru di dunia (Jagganath, 2016).

Dimasa kepemimpinan Presiden Xi, reformasi militer berkaitan dengan penggabungan serangkaian komando militer serta menempatkan *Central Military Commission* (CMC) kedalam kontrol angkatan bersenjata. Menurut kementrian pertahanan China, Yang Yujun upaya reformasi tersebut telah sesuai dengan tindakan dalam lingkungan keamanan terkait misi serta tugas militer untuk menjaga stabilitas regional serta perdamaian dunia (Jagganath, 2016).

Selain didukung oleh kekuatan ekonomi yang besar, reformasi militer China juga di dorong oleh kekuatan militer AS yang menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Sejak para pemimpin China terus berusaha melakukan modernisasi militer, China juga mengeluarkan berbagai kebijakan laur negeri yang sering berkaitan dengan operasi militer di kawasan regional. Beberapa kebijakan militer China dianggap dapat memicu perang terjadi kembali yakni dengan beberapa aktivitas militernya di kawasan Laut China Selatan serta kepulauan Diaoyu/Senkaku.

Seiring dengan transformasi kekuatan militer China di era kepemimpinan presiden XI Jinping, kegiatan militer China telah memicu ketegangan dari berbagai negara di dunia. beberapa kebijakan militer China terkait pelatihan militer di Kawasan Laut China Selatan telah menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara di wilayah tersebut. Bahkan Sebelum tahun 2015, China telah membangun sebuah landasan terbang di salah satu pulau di Kawasan Laut China Selatan yakni pulau Paracel. Selain itu, China juga telah membangun pos-pos Pangkalan angkatan laut di kawasan tersebut yang membuat negara-negara di sekitar wilayah Laut China Selatan yakni Vietnam, Filipina, dan bahkan AS menjadi lebih berantisipasi (Jagganath, 2016).

Gambar 1.4
Pos-Pos Militer China di Kawasan Laut China Selatan



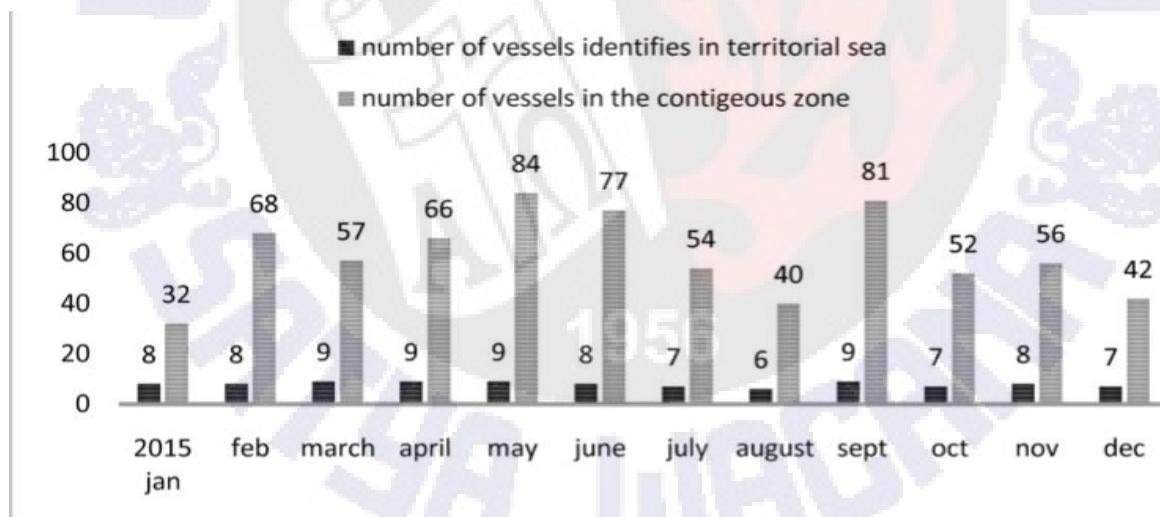
Sumber : Annual Report To Congress, 2018, *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*, Office Of The Secretary Of Defense, Halaman 15.

China dianggap begitu agresif di kawasan Laut China Selatan. Berikut beberapa pos militer yang dibangun China di kawasan Laut China Selatan yakni : *Subi Reef, Fiery Cross Reef, Johnson South Reef, Cuarteron Reef, Gaven Reef, Hughes Reef dan Chigua Reef*, semuanya terletak di kepulauan Kepulauan Spratly.

Selain di kawasan Laut China Selatan, kebijakan militer China terhadap pulau Diaoyu/Senkaku di Timur Laut China yang berbatasan dengan Jepang menjadi isu yang membuat hubungan kedua negara ini semakin memburuk. Tahun 2015 China diduga telah melakukan pelanggaran dengan mengirim kapal perang di teritori Jepang yang mengitari pulau Diaoyu/Senkaku. (Grafik 1.1)

Grafik 1.4

Dugaan Pelanggaran Terhadap Zona dan Laut Teritorial Jepang yang Mengitari Kepulauan Senkaku oleh Kapal-kapal China



Sumber : Ministry of Foreign Affairs, Japan. Data Diolah oleh Jagannath P. Panda, 2016, *China's Transition Under Xi Jinping*, Institute For Defence Studies and Analysis, New Delhi. Halaman 265.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kegiatan China di sekitaran kepulauan Diaoyu/Senkaku, pada bulan maret tahun 2015, Jepang mengirimkan enam kapal patroli penjaga pantai. Jepang juga memutuskan untuk menempatkan 500 pasukan *Ground Self-Defence Forces* (GSDF) di pulau Ishgaki. Ditahun yang sama juga Jepang juga telah mengerahkan Pesawat

Tempur *Air Self Defence Forces* (ASDF) hingga 373 kali untuk melawan jet China. Kebijakan militer China atas kepulauan tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Jepang dan China (MOFA, 2016).

Untuk dapat mendukung tindakan ini, China juga menggunakan berbagai metode dalam memperoleh teknologi militer melalui investasi langsung, pencurian *cyber* bahkan eksploitasi warga negara China (US *Secretary of Defense*, 2018). Upaya China untuk melakukan modernisasi militer ini bertujuan membuat PLA menjadi militer dengan “kelas dunia” pada tahun 2049. Program ini termasuk peningkatan militer terkait kemampuan untuk melakukan pencegahan serangan nuklir atau *Anti Access/Area Denial* (A2/AD). A2/AD China adalah kebijakan strategi China dalam upaya untuk mencegah gerakan musuh di area operasi militer.

A2/AD ini termasuk dalam aktivitas mencegah penyerangan pesawat, kapal perang, dan rudal balistik dan pelayaran khusus yang dirancang untuk menyerang target utama. Modernisasi militer China ini meliputi pengembangan kemampuan untuk melakukan serangan jarak jauh dari musuh yang kemungkinan dapat beroperasi di kawasan Samudera Pasifik bagian Barat. Program modernisasi militer China selama beberapa tahun terakhir telah berupaya mengembangkan dan memperoleh sistem senjata angkatan laut dan udara, seperti pesawat tempur Su-27 dan Su-30 serta dua kapal perusak kelas *Sovremennyy* dari Russia yang dapat meningkatkan kemampuan PLA dalam mempertahankan China dari perbatasan darat dan laut. China juga memiliki sekitar 20 senjata nuklir rudal balistik atau *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBMs) serta satu kapal selam rudal balistik. Kemampuan militer China ini dianggap paling kuat di kawasan Asia baik dalam kemampuan menjangkau udara dan laut. Bahkan PLA sendiri telah di latih untuk menguasai pengembangan *cyberspace*. Berikut merupakan beberapa pengembangan program modernisasi militer China :

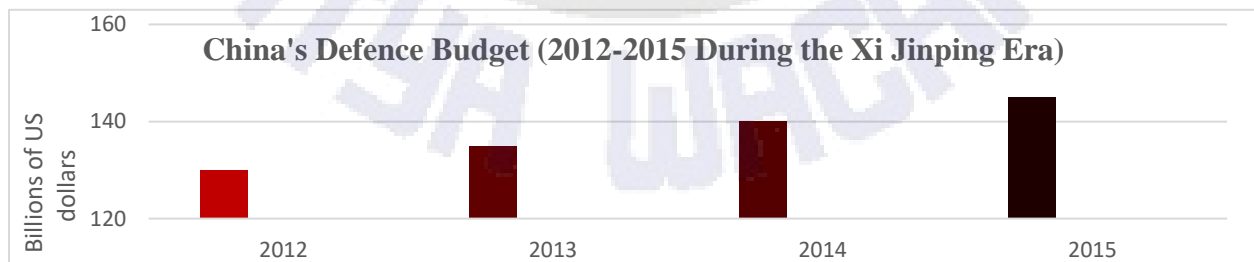
1. **Ballistic Missile Defense (BMD)** :Merupakan pengembangan dari pertahanan rudal balistik yang terdiri dari pencegat energi exo-atmosfer dan endo-atmosfer. Rudal jenis HQ-19 tersebut memiliki kecepatan 3.000 km/jam serta mampu mencegah serangan target.
2. **Surface and Undersea Operations** : Penguasaan *Surface and Undersea Operations* membuat PLA mendapatkan keunggulan maritim dalam pulau-pulau yang membentang dari wilayah Kuril, Taiwan, ke Kalimantan, meliputi kawasan Timur

Laut China, serta Laut China Selatan. Rancangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan ancaman multi-akses kepada musuh yang mendekati perairan China dan wilayah operasinya. Selain itu, China telah menerjunkan CSS-5 ASBM yang dirancang khusus untuk menahan kapal induk musuh yang dapat dijangkau dalam jarak 1.500 km dari lepas pantai China.

3. **Informations Operations** :China menilai bahwa akses untuk mendapatkan kendali atas informasi merupakan faktor penting dari perang modern. PLA menyebut akses atas informasi ini adalah “*Information Blockade*”. Senjata *counterspace* serta *cyber operations* dikombinasikan dalam bentuk kontrol informasi seperti propaganda.
4. **Integrated Air Defense System (IADS)** : Dalam pengembangan IADS,China memiliki arsitektur IADS yang kuat di wilayah daratan dalam jarak 300 nm (556 km) dari pantainya yang dapat mengandalkan jaringan radar terhadap peringatan dini bencana alam, serta jaringan radar pesawat tempur. China juga menempatkan radar serta senjata pertahanan udara pada sebuah pos-pos di kawasan Laut China Selatan (US Secretary of Defense, 2018).

Di era Presiden Xi Jinping China juga berusaha melakukan modernisasi dalam kekuatan persenjataan konvensional yang adalah :*Short-Range Ballistic Missiles* dengan jarak sasaran 300-1.000km, *Medium-Range Ballistic Missiles* (1.000-3.000km), serta *Intermediate-Range Ballistic Missiles* (3.000-5.500km) (US Secretary of Defense, 2018).

Grafik 1.5
Anggaran Pertahanan China di Era Kepemimpinan Presiden XI Jinping Periode 2012-2015



Sumber : China's defence budget (Source : Office of the Secretary of Defense-OSD), *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China*; additional estimates by CSIS, SIPRI, and Global Security. Data diolah oleh Tilman Pradt, 2016, *China's New Foreign Policy, Military Modernisation, Multilateralism, and The China Threat*. Palgrave Macmillan. Halaman 18.

Dari tahun 2013 hingga tahun 2015, China terus mengalami peningkatan militer dilihat dalam anggaran biaya pertahanan China (Grafik 1.4). Selain itu China juga telah terlibat kerjasama dengan Russia berupa pembelian beberapa sistem pertahanan modern yang dapat membuat militer China semakin kuat (Pradt, 2016).

Meski China telah melakukan modernisasi militer secara besar-besaran, program ini dianggap telah melanggar hukum internasional dan menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia termasuk Jepang. Dalam aktivitas militernya, China telah melewati batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan melakukan *military survey* di luar wilayahnya. People's Liberation Army/PLA juga sering dilaporkan melakukan operasi militer di ZEE negara lain (Pradt, 2016).

Tindakan militer China dianggap sebagai ancaman bagi Jepang karena aktivitas militer China yang sering melanggar batas teritori kedua negara. Bahkan dalam laporan *Japan Defense White Paper* yang dikeluarkan tahun 2015, Jepang menyatakan bahwa China adalah ancaman potensial bagi pertahanan negaranya (Burke, 2018).

Pada masa kepemimpinan Xi Jinping hubungan antara China dan Jepang memanas. Kebangkitan militer China di Era Presiden Xi Jinping sejalan dengan tindakan Jepang yang dianggap China secara sepihak menasionalisasikan pulau Diaoyu/Senkaku. Sejak saat itu Beijing mulai memperluas aktivitas militer di kawasan tersebut dengan mengirimkan kapal serta jet tempur dan bahkan sebuah drone didekat zona yang berdekatan dengan perairan Jepang. Aktivitas militer China di kawasan ini merupakan upaya untuk menentang kedaulatan *de facto* pulau Diaoyu/Senkaku. Dalam sebuah laporan artikel Jepang *Sankei Shimbun* tahun 2013, Kapal-kapal dari China tertangkap sering berlayar di sekitar pulau Diaoyu/Senkaku hingga melewati batas perairan Jepang dalam kurun waktu tiga kali sebulan. Pada akhir tahun 2012, Penjaga Pantai Jepang melaporkan bahwa ada kapal *Coast Guard* China telah menyusup ke perairan pulau Senkaku sebanyak 68 kali sejak 11 September, jumlah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Ini terus berlanjut dengan laporan bahwa adanya 188 kapal dari Tiongkok menembus wilayah tersebut pada tahun 2013 88 kapal di tahun 2014, 86 kapal di tahun 2015 (Burke, 2018).

Selain di laut, China juga berupaya memprovokasi Jepang melalui peningkatan aktivitas udara di wilayah Timur Laut China. Kompetisi ini dilatarbelakngi oleh kebuntutan dari kasus

perebutan pulau Senkaku. Dalam laporan dari Kementerian Pertahanan Jepang, pada tahun 2013 Pesawat China diketahui menyusup wilayah udara Jepang yang berdekatan dengan pulau Senkaku. Ditahun yang sama juga pada 13 Desember, sebuah pesawat jenis Y-12 milik negara Administrasi Oceanic yang merupakan entitas China. Sebelumnya pada juli 2013, Jepang juga melakukan penerbangan militer di wilayah selat Miyako. Dua bulan kemudian China melakukan uji coba pemboman jarak jauh di Selat Miyako dengan dua pesawat pemboman jenis H-6(Burke, 2018).

Di era Presiden Xi Jinping, China terus melakukan perombakan militer dan melakukan tindakan provaksi atas Jepang. Pada Tahun 2015, China menyelenggarakan sebuah parade militer untuk memperingati HUT ke-70 Kemenangan Perang Anti-Jepang Rakyat Tiongkok dan Perang Anti-Fasis Dunia. Parade tersebut memamerkan cara-cara militer China melakukan transformasi. Dengan mengundang negara-negara lain, China memperkenalkan banyak sistem baru dalam kekuatan militernya. Tujuh belas negara yang berbeda berpartisipasi dalam parade yang diadakan pada 3 September 2015, sementara PLA menyumbang 12.000 pasukannya. Formasi dalam parade mengisyaratkan keinginan untuk memasukkan perubahan yang jauh dalam militer guna memperoleh kemampuan untuk menjadi kekuatan tempur yang efisien di dunia (Burke,2018).

4.3 Sejarah Aliansi Jepang-AS

Terciptanya hubungan antara Jepang dan AS diisi dengan dinamika dan sejarah yang panjang mengenai relasi kedua negara. Mulai dari pasca PD II, dimana AS menduduki Jepang dalam misi menjadikan Jepang menjadi demokrasi hingga kedua belah pihak sepakat untuk menjadi aliansi dan saling membantu dalam menghadapi tantangan dari tahun ke tahun. Dalam memahami bagaimana hubungan antara Jepang dengan AS lebih lanjut. Penulis telah meringkas sejarah kedua negara dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2

Sejarah Aliansi Jepang-AS

Sejarah Aliansi Jepang-AS	
Tahun	<i>Event/Peristiwa</i>
1945	<ul style="list-style-type: none">- PD II berakhir, Jepang sebagai negara yang kalah dalam perang dunia harus tunduk di bawah <i>Supreme Allied Command Power (SCAP)</i> di bawah AS melalui Jendral Douglas McArthur.- Dalam masa pendudukan AS di Jepang, McArthur memiliki misi utama untuk membuat Jepang menjadi negara Demokrasi dengan tujuan agar Jepang tidak mengulangi peperangan kembali (Koch, 1999)- Salah satu kebijakan progresif yang dilakukan AS di Jepang adalah melakukan reformasi terhadap konstitusi Meiji terhadap kontitusi Jepang yang baru (Nisikawa,2009).
1946	<ul style="list-style-type: none">- Pada tahun 1946, Jepang mendeklarasikan konstitusi baru yang resmi dianut pada tahun 1947. Konstitusi Jepang yang baru menghadirkan beberapa perubahan penting, yaitu: kerajaan dan raja hanya sebatas simbol negara, kedaulatan terletak pada rakyat, menolak perang sebagai solusi perdamaian, dan kekuatan pada <i>judicial review</i> (Goodman,1946)
1951	<ul style="list-style-type: none">- Pada tahun 1951, Jepang dan AS sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan antara kedua belah pihak disela pertemuan dalam Konferensi San Fransisco, dimana Jepang mendeklarasikan sebagai negara anti-perang.- Yoshida Shigeru menyambut positif dan sejak saat itu lahirlah doktrin Yoshida yang berasumsi bahwasanya Jepang memfokuskan kepentingan ekonomi terlebih dahulu, sedangkan dalam masalah keamanan diserahkan oleh pihak AS (Dian,2014)
1960	<ul style="list-style-type: none">- Pasca dua tahun melakukan negosiasi, Perjanjian Keamanan Jepang-AS

	<p>berhasil diperbarui. Dalam perjanjian tersebut terdapat dua hal penting yang menjadi sorotan bagi kedua belah pihak, yaitu Pasal V dan VI. Pasal V berbunyi bahwa AS akan membantu Jepang jika pihak ketiga menyerang atau mengancam kedaulatan Jepang (<i>US-Japan Security Treaty, Article V, 1960</i>). Melanjutkan Pasal V, Pasal VI menyatakan bahwa dalam mewujudkan hal tersebut, AS berhak mendirikan pangkalan militer dalam wilayah Jepang (<i>US-Japan Security Treaty, Article VI, 1960</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1960 an, China mengembangkan proyek nuklir dengan nama “<i>Project 596</i>” (<i>Global Security, 2018</i>). Proyek nuklir milik China ini mendapat respon negatif oleh Perdana Menteri Jepang Eusuke Sato. Dalam merepon kebijakan ini Sato mencoba untuk melakukan lobi terhadap Lyndon Johnson yang pada saat itu memimpin AS, namun kebijakan tersebut ditolak dan kemudian AS menyarankan Jepang menandatangani Non-proliferasi Nuklir dan masuk dalam kebijakan <i>Nuclear Umbrella</i> AS (Wilson and Litai, 1988).
1967	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1967, Eusuke Sato memperkenalkan “<i>Three Non-Nuclear Principles</i>” yang memiliki prinsip bahwa Jepang tidak akan memproduksi, memiliki, serta memperkenalkan nuklir. Sebagai pelengkap, Sato kemudian menyarankan “<i>Four Pilar Nuclear Policy</i>” yang berisi: mempromosikan nuklir sebagai alat perdamaian, pelucutan nuklir secara global, mengandalkan AS sebagai penangkal nuklir, dan menganut <i>Three Non-Nuclear Principles</i> (Sato dalam <i>Nobel Lecture, 1974</i>).
1970	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1970an, AS yang dipimpin oleh Richard Nixon memutuskan untuk memfokuskan kepentingan luar negeri AS dalam perang Vietnam. Kebijakan ini kemudian berdampak kepada keamanan pertahanan Jepang yang lebih longgar dimana Jepang dapat memainkan kepentingan pertahanannya secara mandiri. Melalui Garis Besar Program Pertahanan Nasional pada Oktober 1976 dan Pedoman atau <i>Guidelines</i> November 1978, Jepang melakukan modernisasi berskala besar pada pasukannya dan menjadi titik balik terbentuknya pasukan Jepang <i>Self Defense Force</i> (SDF) (Mcgregor, 2017).

<p>1990</p>	<p>- Pada tahun 1990an, AS yang dipimpin oleh George Bush memasuki Perang Teluk. Dalam hal ini aliansi AS, seperti NATO <i>North Atlantic Treaty Organization</i> (NATO) mendukung AS melalui bantuan pasukan dan dana, sedangkan di satu sisi Jepang merasa bahwa ia tidak memiliki konstitusi resmi yang mendukung gerakan tersebut. Tekanan dari AS pun muncul terhadap Jepang sebagai salah satu aliansi AS. Kemudian dengan perdebatan panjang oleh parlemen, Jepang sepakat untuk memberikan sanksi terhadap Irak dan menghindari pengiriman pasukan sebagai bentuk bantuan terhadap AS. Loyalitas Jepang sebagai aliansi AS pun di pertanyakan pada saat itu (Akihiro Sado, hal 4-5. 2016).</p>
<p>1997</p>	<p>- Pasca jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin di Jerman, AS dan Jepang bergerak cepat untuk mengadopsi pedoman pertahanan baru yang kemudian di sepakati pada tahun 1997. Pedoman Pertahanan baru inimemperluas wilayah cakupan militer Jepang dapat beroperasi. tujuan utama dibentuknya Pedoman Pertahanan pada tahun 1997 adalah untuk memberikan kerangka kerja umum dan arah kebijakan untuk peran dan misi kedua negara serta cara kerja sama dan koordinasi, baik dalam situasi normal dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (<i>US-Japan Defense Cooperation Guidelines</i>, 1997).</p>
<p>2000</p>	<p>- Pada tahun 2001, Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi meloloskan Undang-Undang Anti Terorisme yang memungkinkan Jepang pertama kali mengirimkan pasukan militernya pasca PD II. Kemudian, Sejak 2001, pasukan Jepang (SDF) telah membantu AS dan sekutunya dalam operasi-operasi yang dilakukan di Timur Tengah (Pernyataan Perdana Menteri Junichiro Koizumi <i>dalam</i> MOFA, 2001).</p>

Isu sentral kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang pada tahun demi tahun telah berubah. Peningkatan pesat China dan pergeseran kekuasaan yang terjadi di Asia Pasifik menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah Jepang. Salah satunya seperti China, China telah mencapai

tingkat perekonomian yang positif selama beberapa dekade. Pada tahun 2010, China mampu melampaui Jepang sebagai kekuatan dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Sejalan dengan kenaikan ekonominya, China kemudian menginvestasikan jumlah uangnya terhadap pertahanan negaranya, terutama dalam sektor angkatan laut dan angkatan udara. Hal ini secara tidak langsung berimplikasi pada Jepang. Sejak 1989, pengeluaran pertahanan China telah meningkat hingga 10 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan Jepang, anggaran pertahanan resmi negara itu, berkisar pada 13,4 milyar yen atau sekitar 102 juta euro. Pada tahun 2014, anggaran ini sekitar tiga kali lipat dari anggaran pertahanan yang dimiliki Jepang. Meskipun angkatan bersenjata Jepang secara teknologi lebih unggul daripada China, keunggulan ini terus terkikis. Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga studi di Tokyo, menyimpulkan bahwa China akan mencapai superioritas pertahanan atas Jepang dalam waktu yang akan datang. Bahkan para ahli tersebut percaya China akan melampaui kekuatan militer AS pada 2030 (Sakaki, hal 7. 2015).

Jepang yang notabene mengalami stagnansi selama dua dekade kemudian harus menghadapi kenyataan terhadap pengaruh China yang sedang tumbuh dan berpengaruh dalam bidang ekonomi, politik dan militer baik dalam regional maupun global. Pada tahun 2008, ketika AS mengalami krisis keuangan yang diakibatkan oleh sektor properti, AS tetap melihat Jepang sebagai prioritas utamanya sebagai aliansi. Presiden Obama bahkan pada saat itu menyatakan bahwa kehadiran AS di sana tidak terpengaruh oleh pemotongan pengeluaran pertahanan yang dilakukan AS pasca inflasi terjadi. Dalam menanggapi hal ini, Jepang sendiri menanggapi dengan skeptis tentang komitmen AS. Pemotongan anggaran dan ketidakstabilan di Timur Tengah, dikhawatirkan dapat memaksa AS untuk mempertimbangkan kembali fokusnya pada Asia. Jepang memiliki asumsi bahwa AS tidak lagi bersedia untuk berperan sebagai polisi global setelah intervensi militer di Afghanistan dan Irak. Di sisi lain, pemerintah AS juga belum menunjukkan keterlibatannya dalam konflik Ukraina yang terjadi di Eropa. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan bagi Jepang mengenai keengganan tersebut. (Sakaki, hal 8. 2015)

Dilema keamanan yang dialami Jepang ini kemudian terjawab pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Sebelumnya, pada awal pemerintahan Abe, terdapat polemik politik dalam negeri Jepang mengenai langkah apa yang akan dilakukan Perdana Menteri mereka dalam menjawab tantangan-tantangan keamanan di kawasan wilayah Asia Timur yang dapat mengancam kedaulatan Jepang.

Secara garis besar, terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh Shinzo Abe dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa kebijakan penting tersebut, yaitu :

A. Reinterpretasi Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang

Keinginan Shinzo Abe untuk mereinterpretasi pasal 9 dalam konstitusi dasar Jepang dapat dilihat dari kebijakan keamanan Jepang melalui, “*Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan's Survival and Protect its People*” yang diawali oleh penyampaian pidato Shinzo Abe yang menekankan beberapa hal seperti:

1. Jepang merupakan negara yang cinta damai dan berupaya untuk mewujudkannya melalui kebijakan pro aktif dan misi perdamaian internasional
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia, khususnya dalam Kawasan Asia Pasifik dapat mengancam kedaulatan Jepang dan hal tersebut membuat Jepang harus berperan lebih sesuai kapabilitasnya
3. Perdamaian dan Keamanan Jepang merupakan tanggung jawab pemerintah. oleh karena itu, Jepang harus menciptakan lingkungan internasional yang stabil dengan cara-cara yang baik.
4. Pertahanan bagi Jepang dibutuhkan serta memperkuat aliansi Jepang-AS dalam menjaga perdamaian internasional. Atas dasar itu, untuk mengamankan kehidupan dan mata pencaharian damai rakyatnya dalam situasi apa pun dan memberikan kontribusi lebih proaktif bagi perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional di bawah kebijakan "Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian" berdasarkan prinsip internasional (MOFA, 2014).

Berdasarkan hasil diskusi panjang antara badan pemerintah Jepang, tak lama kemudian pemerintah Jepang segera mengembangkan undang-undang domestik yang diperlukan untuk mengamankan masyarakatnya. Reinterpretasi pasal 9 dapat dilihat dalam bagian ke 3 mengenai “*Measures for Self-Defense Permitted under Article 9 of the Constitution*” yang berisikan :

1. Dalam upaya beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan keamanan di sekitar Jepang dan mengamankan kehidupan dan mata pencaharian damai rakyatnya dalam situasi apa pun, Pemerintah telah memeriksa interpretasi

konstitusi apa yang sesuai. Untuk itu, interpretasi yang logis diperlukan dalam interpretasi pasal 9.

2. Bahasa yang digunakan dalam Konstitusi Pasal 9, tidak melarang penggunaan kekuatan dalam segala bentuk, karena dalam Konstitusi dan tujuan pasal 13 yang menetapkan, "hak mereka (semua rakyat) untuk hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan, akan menjadi pertimbangan tertinggi dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, diizinkan. dan dengan jelas ditunjukkan dalam dokumen "*Relationship between the Right of Collective Self-Defense and the Constitution*".
3. Pemerintah telah mempertimbangkan bahwa penggunaan kekuatan berdasarkan interpretasi ini hanya diizinkan ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi. Namun, mengingat situasi di mana lingkungan keamanan di sekitar Jepang secara fundamental berubah dan terus berkembang oleh pergeseran keseimbangan kekuatan global. Jepang, sebagai biasanya, akan melakukan upaya diplomatik terbaik, jika terjadi perselisihan pemerintah Jepang tetap akan taat terhadap konstitusi yang ada.
4. Penggunaan kekuatan oleh Jepang harus dilakukan sambil mematuhi hukum internasional. Pada saat yang sama, dasar hukum dalam hukum internasional dan interpretasi konstitusi perlu dipahami secara terpisah. Dalam situasi tertentu, penggunaan kekuatan yang disebutkan di atas diizinkan oleh Konstitusi, berdasarkan hukum internasional, didasarkan pada hak bela diri kolektif.
5. Pemerintah akan menetapkan dalam rancangan undang-undang bahwa persetujuan sebelumnya dari pemerintah pada prinsipnya diperlukan saat mengeluarkan perintah operasi SDF untuk melaksanakan penggunaan kekuatan yang diizinkan berdasarkan Konstitusi ketika serangan bersenjata terjadi bukan terhadap Jepang tetapi terhadap negara asing dengan cara yang sama seperti prosedur yang terkait dengan operasi pertahanan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan saat ini (Pernyataan Shinzo Abe

dalam Measures for Self-Defense Permitted under Article 9 of the Constitution, 2014).

B. Revisi Peraturan Mengenai Ekspor Senjata

Hampir empat puluh tahun setelah melarang semua pertahanan dan ekspor terkait pertahanan, pada tahun 2014 pemerintah Jepang mengumumkan "*Three Principles on Transfer of Technology*", yang menetapkan persyaratan untuk transfer teknologi militer oleh pemerintah Jepang dan industri pertahanan ke negara lain, termasuk Amerika Serikat (MOFA, 2014).

Dalam menghadapi tantangan keamanan seperti ekspansi militer China dan upaya Korea Utara, untuk meningkatkan senjata nuklir dan program rudal balistiknya, Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanan dan hubungannya dengan teman dan sekutu, Shinzo Abe kemudian memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang sama sekali baru untuk ekspor pertahanan dengan mengizinkan seluruh kategori transfer pertahanan untuk pertama kalinya dalam sejarah (Hirose, 2014).

Pada saat yang hampir bersamaan dengan revisi pedoman pertahanan pertahanan antara AS-Jepang untuk menjadikan Jepang mitra yang lebih aktif dalam operasi untuk pertahanannya sendiri, dan Pasal 9 konstitusi Jepang sedang ditafsirkan kembali untuk memungkinkan lebih banyak postur pertahanan proaktif dan pertahanan diri secara kolektif, Abe melakukan reformasi besar dalam bidang ekspor pertahanan yang dikenal dengan "*Three New Principles*" yang mengatur mengenai perizinan dan pelarangan ekspor persenjataan. Jika disimpulkan, prinsip-prinsip tersebut berisi tentang:

1. Transfer peralatan pertahanan dilarang saat:
 - 1) melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian dan perjanjian internasional lainnya
 - 2) melanggar kewajiban berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB
 - 3) peralatan dan teknologi pertahanan diperuntukkan bagi negara pihak yang berkonflik
2. Transfer peralatan pertahanan diizinkan pada saat transfer diizinkan ketika mereka berkontribusi pada perdamaian internasional, kerja sama internasional, atau ketika berkontribusi pada keamanan Jepang, dengan :

- 1) Memungkinkannya untuk mengimplementasikan pengembangan bersama internasional dan proyek-proyek produksi dengan sekutu dan mitranya
 - 2) Meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan dengan sekutu dan mitranya
 - 3) Mendukung kegiatan SDF, termasuk pemeliharaan peralatan pertahanan yang mampu meningkatkan keselamatan warga negara Jepang
3. Transfer diizinkan ketika terdapat jaminan mengenai penggunaan tujuan tambahan dan transfer pihak ketiga yang harus disediakan oleh pemerintah penerima kepada pemerintah Jepang sebelum transfer dan yang pemerintah Jepang harus memberikan persetujuannya (MOFA, 2014)

C. Revisi Pedoman Pertahanan antara AS dengan Jepang melalui “*Japan-US Defense Guidelines Cooperation 2015*”

Dalam proses revisi mengenai pedoman pertahanan dengan pihak AS, Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe memiliki berbagai latar belakang dalam merevisi pedoman ini. Menurut Sakoda dalam tulisannya di *Asia Maritime Transparency Initiative*, terdapat tiga faktor kunci yang mendorong kedua pemerintah untuk merevisi Pedoman 1997. Salah satunya adalah lingkungan keamanan di sekitar Jepang atau dalam hal ini kawasan Asia Pasifik.

Pertama, pernyataan bersama *Security Consultative Committee* (SCC) yang mengeluarkan Pedoman Pertahanan 2015 mencatat bahwa AS-Jepang sedang menghadapi lingkungan keamanan yang kompleks di Kawasan Asia Timur, seperti: ketegangan antara China atas klaim teritorialnya di Laut China Timur dan Selatan, provokasi nuklir Korea Utara, dan aktivitas militer Rusia di wilayah sekitar Jepang.

Kedua, sejak di sepakatinya Pedoman Pertahanan 1997, kontribusi Jepang untuk keamanan global kian meningkat. Salah satu kebijakan Jepang dalam hal ini adalah *Proactive Peace to Contribution*. Perlu diketahui, sebelumnya, Jepang dan AS telah bekerja bersama dalam “*Operation Enduring Freedom*” yang mengerahkan pasukan untuk beroperasi di Irak, melakukan operasi anti-pembajakan di Teluk Aden, dan bekerjasama dalam operasi kemanusiaan. Dari sini dapat dilihat bahwa AS dan Jepang bertindak sebagai dua negara yang tidak bisa dipisahkan, sehingga revisi Pedoman

Pertahanan yang baru akan memberikan dampak yang efektif bagi kerja kedua negara dalam aliansi.

Ketiga, kebijakan keamanan Jepang yang berubah di bawah pemerintahan Shinzo Abe, kebijakan tersebut seperti: mereinterpretasi Konstitusi pada pasal 9 dalam rangka *Collective Self Defense*, merevisi kebijakan ekspor persenjataan terhadap mitra yang berkualifikasi, peningkatan dalam bidang *Cyberspace*, serta memperluas cakupan kerja sama bilateral. Perubahan kebijakan keamanan Jepang penting untuk menentukan bagaimana Aliansi AS-Jepang menggabungkan bidang-bidang ini untuk efektivitas aliansi (Sakoda, 2015).

4.4. Japan-US Defense Cooperation Guidelines

4.4.1. Japan-US Defense Cooperation Guidelines 1978

Pada tahun 1975, pasca rapat di Tokyo antara pemerintah Jepang dengan AS, kedua negara ini sepakat untuk membuat Sub-komite untuk Kerjasama Pertahanan Jepang-AS (*Subcommittee on U.S.-Japan Defense Cooperation*). Sub-komite ini kemudian menyepakati Pedoman Pertahanan pada 27 November 1978 yang menyoroti tiga hal utama, yaitu : *Posture for Detering Aggression, Actions in Response to an Armed Attack Against Japan*, dan *Japan-U.S. cooperation in the case of situations in the Far East outside of Japan which will have an important influence on the security of Japan*. Pedoman ini memfokuskan pencegahan aliansi melalui kekuatan gabungan antara pasukan Jepang dan pasukan AS.

Berikut merupakan Guidelines 1997 yang telah di ringkas oleh penulis.

A. Posture for Detering Aggression

1. Jepang, sesuai kebijakan pertahanannya, akan memiliki kemampuan pertahanan pada skala yang sesuai dengan ruang lingkup yang diperlukan untuk pertahanan diri, sedangkan AS akan mempertahankan kemampuan pencegah nuklir dan penyebaran ke depan pasukan yang siap tempur dan pasukan lainnya yang mampu memperkuat mereka.
2. Agar dapat melakukan kerjasama secara terkoordinasi, Jepang dan AS akan berusaha mencapai postur kerjasama seperti operasi, intelejen, dan logistik. Dengan demikian,

- a. SDF dan pasukan AS akan melakukan studi, pelatihan dan latihan, mempelajari dan menyiapkan prosedur-prosedur umum terkait kerjasama, dan komunikasi.
- b. SDF dan pasukan AS akan mengembangkan serta saling bertukar informasi dan juga mempromosikan informasi dalam bidang intelejen.
- c. SDF dan Pasukan AS akan bertindak berdasarkan prinsip dasar bahwa masing-masing negara bertanggung jawab atas logistik pasukannya sendiri. Selain itu, kedua belah pihak akan berkoordinasi erat satu sama lain atau melakukan studi sebelumnya mengenai fungsi-fungsi seperti pasokan, transportasi, pemeliharaan, fasilitas, dll.

B. *Actions in Response to an Armed Attack Against Japan*

1. Jepang dan AS akan membuat persiapan yang diperlukan untuk memastikan tindakan kedua belah pihak terkoordinasi melalui pembentukan pusat koordinasi. SDF dan pasukan AS akan terlebih dahulu membuat standar umum yang nantinya akan mengindikasikan tahap-tahap kesiapan.

2. Ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi:

- a. Jepang akan mengusir agresi dalam skala kecil, ketika dalam skala besar AS akan membantu Jepang.
- b. Ketika SDF dan pasukan AS melakukan pertahanan operasi untuk Jepang, kedua belah pihak akan melakukan koordinasi timbal balik dengan kapasitas pertahanan masing-masing.

1) Konsep Operasi

SDF akan melakukan operasi defensif di wilayah Jepang dan perairan dan wilayah udara di sekitarnya. Pasukan A.S. akan mendukung operasi SDF. SDF dan pasukan AS akan bersama-sama melakukan operasi darat, udara, dan laut, dengan :

a) Operasi darat:

SDF dan pasukan AS akan bersama-sama melakukan kerjasama operasi pertahanan darat melalui pembagian tugas.

b) Operasi Maritim:

SDF dan Angkatan Laut AS akan bersama-sama melakukan operasi maritim untuk pertahanan perairan sekitar dan perlindungan jalur komunikasi laut.

c) Operasi Udara:

Angkatan Udara Bela Diri Udara (ASDF) dan Angkatan Udara AS akan bersama-sama melakukan operasi udara untuk pertahanan Jepang. Saat melakukan operasi darat, laut, dan udara, SDF dan Angkatan A.S. akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pasukan satu sama lain.

2) Komando dan Koordinasi

SDF dan pasukan AS akan mengambil tindakan sesuai operasional yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu.

3) Pusat Koordinasi

SDF dan pasukan AS akan melakukan koordinasi yang bersifat timbal balik pada operasi, intelijen dan dukungan logistik melalui pusat koordinasi.

4) Aktivitas Intelijen

SDF dan Pasukan A.S. akan mengoordinasikan kegiatan intelijen secara erat pada setiap tahap persyaratan, pengumpulan, produksi, dan penyebaran.

5) Aktivitas Logistik

Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan kegiatan yang saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas fungsi logistik, melalui:

- a) Pasokan. Amerika Serikat akan mendukung akuisisi pasokan untuk sistem asal AS sementara Jepang akan mendukung akuisisi pasokan di Jepang.
- b) Transportasi. Jepang dan AS akan melakukan kerjasama transportasi suplai dari AS ke Jepang.

- c) Pemeliharaan. AS akan mendukung pemeliharaan barang yang berasal dari AS, yang berada di luar kemampuan perawatan Jepang. dan Jepang akan mendukung pemeliharaan peralatan Pasukan AS di Jepang.
- d) Fasilitas. SDF dan pasukan AS akan menggunakan fasilitas yang ada di Jepang. Namun, jika diperlukan pasukan AS akan diberikan tambahan fasilitas di Jepang sesuai peraturan yang sudah ada.

C. Japan-U.S. cooperation in the case of situations in the Far East outside of Japan which will have an important influence on the security of Japan.

Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat akan berkonsultasi bersama dari waktu ke waktu kapan pun perubahan dalam keadaan demikian diperlukan. Ruang lingkup dan modalitas bantuan fasilitatif yang akan diperluas oleh Jepang ke Pasukan AS dalam kasus situasi di Timur Jauh di luar Jepang yang akan memiliki pengaruh penting 'pada keamanan Jepang akan diatur oleh Perjanjian Keamanan Jepang-AS. Pengaturan terkait, perjanjian terkait lainnya antara Jepang dan Amerika Serikat, dan hukum dan peraturan terkait Jepang. Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan studi sebelumnya mengenai ruang lingkup dan modalitas bantuan fasilitatif yang akan diperluas ke Pasukan A.S. oleh Jepang dengan kerangka hukum yang disebutkan di atas. Studi semacam itu akan mencakup ruang lingkup dan modalitas penggunaan bersama pangkalan-pangkalan Pertahanan-Diri oleh Pasukan A.S. dan bantuan fasilitatif lainnya yang akan diperpanjang (*US-Japan Guidelines Defense Cooperation*, 1978)

4.4.2 Japan-US Guidelines Defense Cooperation 1997

Sebagai langkah aliansi Jepang-AS dalam memainkan perannya di kawasan Asia Timur serta mewujudkan kawasan yang damai dan tentram, pada tahun 1996, Jepang dan AS mengumandangkan "*U.S.-Japan Joint Declaration on Security*" oleh Perdana Menteri Hashimoto dan Presiden Clinton yang menegaskan kembali bahwa hubungan keamanan AS-Jepang tetap

menjadi landasan untuk mencapai tujuan keamanan bersama, dan untuk mempertahankan lingkungan yang stabil dan makmur di wilayah Asia Pasifik.

Sejak dibentuknya pedoman pertahanan pada tahun 1978, kedua belah pihak telah melaksanakan penelitian lanjutan mengenai program-program yang akan dilakukan kedua negara kedepan yang berdampak terhadap aliansi. Di sisi lain, meskipun Perang Dingin sudah berakhir, ketidakstabilan dan ketidakpastian politik dalam kawasan Asia Pasifik masih ada. Oleh karena itu, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di daerah sekitar Jepang telah dianggap lebih penting untuk keamanan Jepang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah AS dan Jepang memutuskan untuk memeriksa cara-cara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan mereka berdasarkan pedoman yang menimbang:

- A. Kerjasama didalam keadaan normal
- B. Tindakan dalam merespon serangan bersenjata terhadap Jepang
- C. Kerjasama dalam wilayah Jepang yang memiliki pengaruh penting pada perdamaian dan keamanan bagi Jepang (*The Interim Report on the Review of The Guidelines for the US-Japan Defense Cooperation*, 1997).

Berikut merupakan Guidelines 1997 yang telah di ringkas oleh penulis.

A. *The Aim of the Guidelines*

Tujuan utama pedoman ini adalah untuk menciptakan dasar yang kuat untuk kerja sama antara Jepang-AS yang lebih efektif dan kredibel dalam keadaan normal, dalam kasus serangan bersenjata terhadap Jepang, dan dalam situasi di daerah sekitar Jepang serta mengatur cara kerja aliansi.

B. *Basic Premise and Principles*

1. Hak dan kewajiban dalam *US-Japan Security* 1951, tetap dan tidak berubah.
2. Jepang akan melakukan semua tindakannya sesuai konstitusi dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Jepang.
3. Semua tindakan yang dilakukan Jepang dan AS akan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
4. Kedua pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi secara tepat akan kerjasama ini melalui kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil.

C. *Cooperation Under Normal Circumstances*

1. Pertukaran informasi dan konsultasi kebijakan. Kedua pemerintah akan meningkatkan pertukaran informasi dan intelijen, dan pertukaran pandangan tentang situasi internasional yang menjadi kepentingan bersama, terutama di kawasan Asia-Pasifik, seperti pertemuan SCC dan *Security Sub-Comitee (SSC)*.
2. Berbagai jenis kerjasama keamanan. Kerjasama bilateral untuk mempromosikan kegiatan regional dan global di bidang keamanan berkontribusi pada penciptaan lingkungan keamanan internasional yang lebih stabil. Kedua belah pihak akan saling bahu-membahu dalam menjalankan kerjasama tersebut.
3. Program Bilateral. Kedua pemerintah akan melakukan kerja bilateral, termasuk perencanaan pertahanan bilateral jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang, dan perencanaan kerja sama dalam situasi di daerah sekitar Jepang.

D. Actions in Response to an Armed Attack Against Japan

1. Konsep Operasi
 - a. Operasi dalam menangkal serangan udara terhadap Jepang. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi secara bilateral untuk melawan serangan udara terhadap Jepang.
 - b. Operasi dalam mempertahankan perairan dan melindungi jalur komunikasi laut. SDF akan memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi pelabuhan utama dan selat, perlindungan kapal di perairan, serta untuk operasi lainnya di wilayah Jepang, sedangkan pasukan A.S. akan mendukung SDF dan melakukan operasi.
 - c. Operasi dalam menangkal serangan udara dan laut di Jepang. SDF dan pasukan AS akan bekerjasama untuk melawan agresi udara dan laut.
 - d. Respon terhadap ancaman lain :
 - 1) SDF memiliki tanggung jawab dalam mengusir segala bentuk agresi yang bersifat serangan dan pasukan AS akan mendukung dengan tepat dengan kondisi situasional.
 - 2) SDF dan pasukan AS akan bekerjasama dalam merespon serangan rudal balistik. Pasukan AS akan memberikan informasi, pertimbangan, dan pasukan jika diperlukan.
 - 3) Kegiatan-kegiatan dan persyaratan dalam operasi :

- a) Komando dan koordinasi. SDF dan pasukan AS dalam kerja bekerjasama akan mengambil tindakan melalui masing-masing saluran komando dan kontrol.
- b) Mekanisme koordinasi bilateral. SDF dan pasukan AS akan berkoordinasi melalui pusat koordinasi.
- c) Komunikasi dan elektronik. SDF dan pasukan AS akan memastikan penggunaan komunikasi dan elektronik dengan efektif.
- d) Aktivitas intelejen. SDF dan pasukan AS akan bekerja sama dalam kegiatan intelejen untuk memastikan operasi bilateral yang efektif.
- e) Kegiatan dalam dukungan logistik. Pasukan AS dan Pasukan Bela Diri akan melakukan kegiatan dukungan logistik secara efisien dan benar sesuai dengan pengaturan bilateral yang sesuai, dalam:
 - (1) Pasokan
 - (2) Transportasi
 - (3) Pemeliharaan
 - (4) Fasilitas
 - (5) Layanan Kesehatan

E. Cooperation in Situation in Areas Surrounding Japan That Will Have an Important Influence on Japan Peace and Security (Situations Surrounding Japan)

1. Ketika situasi di area wilayah Jepang diantisipasi. Ketika situasi di daerah sekitar Jepang diantisipasi, SDF dan pasukan AS akan mengintensifikan pertukaran informasi, intelejen dan konsultasi kebijakan. Pada saat yang sama mereka akan segala upaya, termasuk diplomatic untuk mencegah memburuknya situasi dan melakukan koordinasi mekanisme. Jika keadaan berubah, peningkatan intelejen, pengawasan, dan kesiapan akan dilakukan.
2. Respon terhadap situasi di wilayah sekitar Jepang.
 - a. Kerjasama melalui kegiatan yang diinisiasi oleh kedua pemerintah.
 - 1) Kegiatan bantuan dan penanganan pengungsi. SDF dan pasukan AS akan bekerjasama ketika terdapat aliran pengungsi yang memasuki wilayah Jepang.

- 2) Pencarian dan Penyelamatan. SDF dan pasukan AS akan bekerjasama dalam misi pencarian dan penyelamatan. SDF akan melakukan di sekitaran wilayah Jepang, sedangkan AS akan melakukan di daerah operasional.
 - 3) Operasi evakuasi non-kombatan. Ketika muncul kebutuhan bagi warga AS dan non-Jepang untuk dievakuasi dari negara ketiga ke tempat yang aman, masing-masing SDF dan pasukan jawab untuk mengevakuasi warga negaranya sendiri serta untuk berurusan dengan pihak berwenang di daerah yang terkena dampak, namun tetap melakukan koordinasi.
 - 4) Kegiatan dalam memastikan efektivitas sanksi ekonomi dan pemeliharaan perdamaian serta stabilitas internasional. Setiap Pemerintah akan berkontribusi pada kegiatan untuk memastikan efektivitas sanksi ekonomi untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas internasional. Kedua Pemerintah akan bekerja sama satu sama lain sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing.
- b. Dukungan Jepang bagi Operasi yang dilakukan AS
- 1) Penggunaan fasilitas. Berdasarkan Perjanjian 1951, jika diperlukan, SDF akan membantu pasukan AS dalam menggunakan baik fasilitas yang dimiliki SDF, bandara sipil, dan pelabuhan.
 - 2) Dukungan area belakang. SDF akan memberikan dukungan area belakang kepada Pasukan AS yang sedang melakukan operasi untuk tujuan mencapai tujuan Perjanjian Keamanan AS-Jepang. Tujuan utama dukungan area belakang ini adalah untuk memungkinkan Pasukan A.S. menggunakan fasilitas dan melakukan operasi secara efektif.
- c. Kerjasama operasi antara Jepang dan AS.
- Karena situasi di daerah sekitar Jepang memiliki pengaruh penting pada perdamaian dan keamanan Jepang, SDF akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan intelijen, pengawasan, serta penyapuan ranjau untuk melindungi dan memastikan keselamatan navigasi, sedangkan pasukan AS akan melakukan operasi untuk memulihkan perdamaian dan keamanan yang dipengaruhi oleh situasi di daerah sekitar Jepang.

F. Bilateral Programs For Effective Defense Cooperation Under The Guidelines

Kerja sama bilateral yang efektif berdasarkan pedoman mensyaratkan Jepang dan AS untuk melakukan dialog konsultatif di seluruh spektrum kondisi keamanan, baik dalam keadaan normal, serangan bersenjata terhadap Jepang, dan situasi di daerah sekitar Jepang. Kedua belah pihak harus mendapat informasi dan berkoordinasi di berbagai tingkatan untuk memastikan kerja sama pertahanan bilateral yang sukses. Untuk mencapai hal ini, kedua Pemerintah akan memperkuat pertukaran informasi dan intelijen serta konsultasi kebijakan mereka dengan memanfaatkan semua peluang yang ada, termasuk pertemuan SCC dan SSC yang akan menetapkan dua mekanisme berikut untuk memfasilitasi konsultasi, mengoordinasikan kebijakan, dan mengoordinasikan fungsi operasional.

Pertama, kedua Pemerintah akan mengembangkan mekanisme komprehensif untuk perencanaan bilateral dan penetapan standar dan prosedur bersama, yang melibatkan tidak hanya SDF dan pasukan AS, tetapi juga lembaga terkait lainnya dari masing-masing Pemerintah. Kedua, kedua pemerintah juga akan menetapkan dalam keadaan normal, mekanisme koordinasi bilateral yang akan mencakup badan-badan terkait dari kedua negara untuk mengoordinasikan kegiatan masing-masing (*US-Japan Guidelines Defense Cooperation*, 1997).

4.4.3 US-Japan Defence Guidelines Cooperation 2015

Pada tahun 2015, kedua belah pihak, baik AS dan Jepang sepakat untuk memperbarui pedoman pertahanan mereka yang selama ini digunakan dalam mekanisme-mekanisme kerja aliansi di kawasan Asia Timur, khususnya Jepang. Kesepakatan ini bermula ketika disepakatinya pedoman baru melalui *Joint Statement* antara kedua belah pihak di New York pada 27 April 2015. Kedua belah pihak sepakat bahwa pedoman kerjasama pertahanan yang baru ini dilakukan untuk mempromosikan aliansi yang efektif dalam menjawab tantangan di abad ke-21. Pedoman ini hadir melalui kebijakan masing-masing negara dimana AS memiliki kebijakan penyeimbangan kembali (*rebalancing*) pengaruhnya dalam kawasan Asia Pasifik, sedangkan Jepang dengan “*Proactive Peace Contribution*” nya sebagai prinsip yang dianut Jepang dalam menciptakan keamanan regional dan global.

Melalui tema aliansi yang bertajuk “*Seamless, Robust, Flexible, Effective*”, kedua pihak telah sepakat untuk memperluas kerjasama dalam beberapa hal, seperti:

- A. Mekanisme koordinasi aliansi
- B. Kerjasama dalam regional dan global
- C. Kerjasama strategis yang baru
- D. Bantuan kemanusiaan dan bencana alam, dan
- E. Pendanaan yang kuat

Berikut merupakan Guidelines yang telah di ringkas oleh penulis.

A. *Defense Cooperation and the Aim of the Guidelines*

Pedoman Pertahanan ini bertujuan untuk memastikan perdamaian dan keamanan Jepang dalam situasi apapun, baik masa damai maupun hingga adanya kemungkinan yang terjadi serta untuk mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.

B. *Basic Premises and Principles*

1. Hak dan kewajiban dalam *US-Japan Security* 1951, tetap dan tidak berubah.
2. Jepang akan melakukan semua tindakannya sesuai konstitusi dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Jepang.
3. Semua tindakan yang dilakukan Jepang dan AS akan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
4. Kedua pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi secara tepat akan kerjasama ini melalui kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil.

C. *Strengthened Alliance Coordination*

1. Koordinasi Mekanisme Aliansi

Untuk mengatasi permasalahan dengan baik dan efektif di dalam setiap situasi yang memengaruhi perdamaian dan keamanan Jepang atau situasi lain apa pun yang mungkin memerlukan respons aliansi, kedua pemerintah akan menggunakan Mekanisme Koordinasi Aliansi.

2. Peningkatan Koordinasi Aliansi

Kedua pemerintah mengakui pentingnya untuk memperkuat kerja sama antara SDF dan pasukan AS melalui pemahaman fungsi koordinasi operasional.

3. Perencanaan Bilateral

Kedua pemerintah akan terus mengembangkan dan memperbarui rencana bilateral untuk memastikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan operasi terkoordinasi antara SDF dan pasukan AS.

D. *Seamlessly Ensuring Japan's Peace and Security*

1. Tindakan Kooperatif dalam Masa Damai
 - a. Intelejen, Pengawasan, dan Pengintaian. Dalam rangka mengidentifikasi indikasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, kedua pemerintah akan berbagi dan melindungi informasi dan intelijen.
 - b. Pertahanan Rudal Udara. Pasukan Bela Diri dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat akan mempertahankan dan memperkuat pencegahan dan postur pertahanan mereka terhadap peluncuran rudal balistik dan serangan udara melalui, peringatan dini, interoperabilitas, jangkauan, dan informasi.
 - c. Keamanan Maritim. Kedua pemerintah akan bekerja sama erat satu sama lain dalam langkah-langkah untuk menjaga ketertiban laut berdasarkan hukum internasional, termasuk *Freedom of Navigation*.
 - d. Perlindungan Aset. SDF dan pasukan AS akan melindungi asset masing-masing jika terlibat dalam kegiatan yang berpengaruh terhadap keamanan Jepang.
 - e. Latihan dan Pelatihan. SDF dan pasukan AS akan melakukan pelatihan dan latihan baik dalam bilateral maupun multilateral yang dilakukandi dalam maupun diluar wilayah Jepang dan kedua pemerintah akan memfasilitasi.
 - f. Bantuan Logistik. SDF dan pasukan AS akan saling membantu dalam menyuplai logistik terhadap satu sama lain jika dibutuhkan dan tidak terbatas.
 - g. Penggunaan Fasilitas. SDF dan pasukan AS akan saling berbagi fasilitas jika diperlukan dalam rangka memastikan keamanan wilayah, termasuk penggunaan bandara sipil dan pelabuhan.
2. Respon terhadap Ancaman Baru Bagi Perdamaian dan Kemanan Jepang

- a. Operasi evakuasi non-kombatan. Pemerintah Jepang dan AS akan mengevakuasi masing-masing warga negaranya sendiri, namun agar proses evakuasi berjalan lancar, kedua negara akan menggunakan mekanisme koordinasi aliansi agar efektif.
 - b. Keamanan Maritim. Pemerintah Jepang dan AS dengan pertimbangan kemampuan masing-masing akan bekerjasama secara erat untuk meningkatkan keamanan maritim.
 - c. Penanganan Pengungsi. Pemerintah Jepang dan AS akan bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan Jepang dengan menangani pengungsi secara manusiawi dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan hukum internasional.
 - d. Pencarian dan Penyelamatan. Pemerintah Jepang dan AS akan memberikan dukungan timbal balik dalam misi pencarian dan penyelamatan
 - e. Perlindungan Fasilitas. SDF dan pasukan AS akan melindungi fasilitas mereka masing-masing. Namun, pemerintah Jepang akan membantu pasukan AS ketika dibutuhkan
 - f. Bantuan Logistik. Kedua pemerintah akan meningkatkan dukungan timbal balik dalam menyuplai logistik.
 - g. Penggunaan Fasilitas. Pemerintah Jepang akan mengizinkan penggunaan fasilitas sesuai dengan Perjanjian Keamanan Jepang-AS, termasuk penggunaan bandara sipil dan pelabuhan
3. Tindakan dalam Merespon Serangan Bersenjata terhadap Jepang
- a. Ketika Serangan terhadap Jepang akan segera terjadi. Kedua pemerintah akan mengintensifikan, meningkatkan, dan memaksimalkan kerjasama antara kedua belah pihak, termasuk upaya diplomatik, untuk mencegah memburuknya situasi lebih lanjut.
 - b. Ketika Serangan terhadap Jepang terjadi
 - 1) Prinsip-prinsip untuk tindakan terkoordinasi. Jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang, SDF dan pasukan AS akan saling membantu untuk mengatasi serangan tersebut. Tugas utama SDF

adalah melindungi kedaulatan, sedangkan pasukan AS membantu proses penangkalan.

2) Konsep Operasi

- a. Operasi untuk mempertahankan wilayah udara. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi bilateral untuk mempertahankan wilayah udara di atas dan di sekitar Jepang.
- b. Operasi untuk menangkal rudal balistik. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi bilateral untuk melawan serangan rudal balistik terhadap Jepang.
- c. Operasi untuk mempertahankan wilayah maritim. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi bilateral untuk mempertahankan perairan di sekitar Jepang dan untuk mengamankan keselamatan jalur laut.
- d. Operasi untuk mempertahankan wilayah daratan. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi bilateral untuk melawan serangan darat terhadap Jepang melalui darat, udara, maritim, atau kekuatan amfibi.
- e. Operasi lintas domain. SDF dan pasukan AS akan melakukan operasi bilateral lintas domain untuk menangkal serangan bersenjata terhadap Jepang dan untuk mencegah serangan lebih lanjut.

3) Kegiatan Pendukung Operasi

- a) Penggunaan komunikasi dan elektronik. Dalam masalah ini, kedua pemerintah akan memberikan dukungan timbal balik untuk memastikan penggunaan yang efektif dari kemampuan komunikasi dan elektronik sesuai dengan kebutuhan.
- b) Pencarian dan penyelamatan. SDF dan pasukan AS akan bekerja sama dengan badan-badan terkait dalam memberikan dukungan timbal balik dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

- c) Bantuan logistik. SDF dan pasukan AS akan memberikan dukungan logistik secara fleksibel dan tepat waktu, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- d) Penggunaan Fasilitas. Pemerintah Jepang akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan Perjanjian Keamanan Jepang-AS.
- e) Perlindungan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir (CBRN). Pemerintah Jepang bertanggung jawab dalam merespon insiden atau serangan bahan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir di Jepang. Sedangkan AS, memiliki tanggung jawab untuk membantu SDF dalam implementasinya.

4. Tindakan dalam Merespon Serangan Bersenjata terhadap negara selain Jepang.

Ketika Jepang dan Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk kedaulatan dengan Konstitusi masing-masing dan hukum untuk menanggapi serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat atau negara ketiga, dan Jepang belum diserang, kedua pemerintah akan bekerja sama secara erat untuk menanggapi serangan bersenjata dan untuk mencegah serangan lebih lanjut melalui mekanisme koordinasi aliansi. Selain itu, Jepang dan AS akan bekerja sama sebagaimana diperlukan dengan negara-negara lain untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan atas serangan bersenjata.

5. Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana Alam di Jepang

Ketika terjadi bencana alam di Jepang, tugas utama untuk memulihkan bencana alam yang terjadi merupakan tugas utama Jepang. Namun, dalam hal ini, pasukan AS sesuai dengan kemampuannya akan membantu Jepang dalam memulihkan bencana alam yang terjadi di Jepang, termasuk dengan menginternsifikasikan informasi.

E. Cooperation for Regional and Global Peace and Security

1. Kerjasama dalam Aktivitas Internasional

- a. Operasi perdamaian. Ketika kedua pemerintah terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian, kedua belah pihak akan bekerjasama secara erat dalam rangka memaksimalkan interoperabilitas antara SDF dan pasukan AS. Kedua pemerintah juga dapat mendukung melalui perlindungan dan logistik saat bertugas.
- b. Bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Ketika kedua pemerintah melakukan operasi bantuan kemanusiaan dan bencana alam dalam menanggapi permintaan dari pemerintah terkait atau organisasi internasional, kedua pemerintah akan bekerja sama secara erat untuk memberikan dukungan timbal balik.
- c. Keamanan maritim. Ketika kedua pemerintah melakukan kegiatan untuk keamanan maritim, kedua pemerintah akan bekerja sama secara erat sesuai dengan kebutuhan,
- d. Pengembangan kapasitas mitra. Kedua pemerintah akan bekerja sama dalam kegiatan peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman mereka dengan tujuan memperkuat kemampuan mitra untuk merespons tantangan keamanan yang dinamis.
- e. Operasi evakuasi non-kombatan. Dalam keadaan yang diperlukan untuk mengevakuasi orang-orang yang tidak berperang, kedua pemerintahan akan saling membantu, termasuk dalam mengupayakan upaya diplomatik.
- f. Intelejen, pengawasan, dan pengintaian. Ketika kedua pemerintah berpartisipasi dalam kegiatan internasional, SDF dan pasukan AS akan bekerja sama dalam Intelejen, pengawasan, dan pengintaian berdasarkan ketersediaan dan kemampuan masing-masing.
- g. Latihan dan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan internasional, SDF dan pasukan AS akan melakukan dan berpartisipasi dalam pelatihan dan latihan bersama untuk memperkuat interoperabilitas, keberlanjutan, dan kesiapan pasukan.
- h. Bantuan logistik. Ketika berpartisipasi dalam kegiatan internasional, kedua pemerintah akan bekerja sama untuk memberikan dukungan logistik

satu dengan lain. Pemerintah Jepang akan memberikan dukungan logistik bila perlu, sesuai dengan hukum Jepang.

2. Operasi Trilateral dan Multilateral

Kedua pemerintah akan mempromosikan dan meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan trilateral dan multilateral. Secara khusus, kedua pemerintah akan memperkuat upaya dan mencari peluang untuk bekerja sama dengan mitra regional lain, serta organisasi internasional.

F. *Space and Cyberspace Cooperation*

1. Kerjasama dalam ruang angkasa

Menyadari aspek keamanan dari domain ruang angkasa, kedua pemerintah akan mempertahankan dan memperkuat kemitraan mereka untuk mengamankan penggunaan ruang yang bertanggung jawab, damai, dan aman. Untuk mencapai misi mereka secara efektif dan efisien, Pasukan Bela Diri dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat akan terus bekerja sama dan berkontribusi pada upaya seluruh pemerintah dalam memanfaatkan ruang angkasa.

2. Kerjasama dalam bidang *Cyberspace*

Untuk membantu memastikan penggunaan *cyberspace* secara aman dan stabil, kedua pemerintah akan berbagi informasi tentang ancaman dan kerentanan di *cyberspace* secara tepat waktu dan rutin sesuai oleh kebutuhan. Selain itu, SDF dan pasukan AS akan :

- a. mempertahankan postur untuk memonitor jaringan dan sistem masing-masing
- b. saling membantu dan melakukan pertukaran pendidikan dalam *cybersecurity*
- c. memastikan ketahanan jaringan dan sistem masing-masing untuk mencapai jaminan misi
- d. berkontribusi pada upaya seluruh pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber
- e. melakukan latihan-latihan secara bilateral untuk memastikan kerja sama yang efektif dalam menanggapi keamanan siber.

G. Perusahaan Bilateral

1. Kerjasama Peralatan dan Teknologi Pertahanan

Dalam meningkatkan interoperabilitas dan mempromosikan akuisisi serta pemeliharaan yang efisien, kedua pemerintah akan:

- a. Bekerja sama dalam penelitian bersama, pengembangan, produksi, dan pengujian serta evaluasi
- b. Memperbaiki dan memelihara peralatan dalam rangka efisiensi serta kesiapan bersama
- c. memfasilitasi pengadaan pertahanan secara timbal balik untuk meningkatkan perolehan yang efisien, interoperabilitas, dan kerja sama peralatan serta teknologi pertahanan
- d. Penjajakan peluang kerja sama dengan mitra di bidang peralatan dan teknologi pertahanan.

2. Kerjasama Intelejen dan Keamanan Informasi

- a. Kedua pemerintah akan meningkatkan kerja sama intelijen dan berbagi informasi di semua tingkatan, termasuk tingkat strategis maupun nasional.
- b. Kedua pemerintah akan terus mempromosikan kerjasama dalam memperkuat kebijakan, praktik, dan prosedur yang terkait dengan perlindungan informasi rahasia.
- c. Kedua pemerintah juga akan menjajaki peluang kerja sama dengan mitra dalam berbagi informasi

3. Pertukaran Pendidikan dan Penelitian

Menyadari pentingnya kerja sama intelektual mengenai keamanan dan pertahanan, kedua pemerintah akan memperdalam pertukaran anggota organisasi terkait dan memperkuat komunikasi antara lembaga penelitian dan pendidikan masing-masing pihak. Upaya-upaya semacam itu akan berfungsi sebagai landasan abadi bagi para pejabat keamanan dan pertahanan untuk membagikan pengetahuan mereka dan memperkuat kerja sama (*US-Japan Guidelines Defense Cooperation*, 1997).

Berikut disertakan tabel perbandingan antara US-Japan Defence Cooperation Guidelines dari tahun 1978, 1997, dan 2015.

Tabel 1.1

Perbandingan *US-Japan Defense Guidelines* 1978,1997, dan 2015

Indikator	1978	1997	2015
Prosedur Kerja	Kerjasama Pertahanan (<i>Defensive Cooperation</i>)	Kerjasama Pertahanan Antara Kedua Negara (<i>Bilateral Defense Cooperation</i>)	Kerjasama Keamanan Bersama (<i>Collective Self Defense</i>)
Tujuan Pedoman	Penjelasan lebih rinci mengenai kesepakatan perjanjian keamanan Jepang dan AS mengenai prosedur pembagian kerjasama pertahanan antara pasukan AS dan pasukan Jepang (SDF)	Kerjasama yang lebih efektif dan kredibel dalam situasi normal, ketika terjadi penyerangan terhadap Jepang serta ketika ada ancaman di sekitar wilayah Jepang yang juga mengancam Amerika Serikat	Terciptanya sinergi kerjasama pertahanan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan di sekitar Jepang, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Pasifik dan lainnya
Agenda Guidelines	a. Kapasitas pertahanan ketika Jepang diserang atau ada agresi b. Tindakan dalam merespon serangan militer yang ditujukan ke Jepang c. Kerjasama ketika situasi di luar Jepang (dalam lingkup Asia	a. Prinsip dasar kerjasama kedua negara b. Mekanisme kerjasama dalam situasi normal c. Tindakan militer ketika Jepang diserang d. Kerjasama untuk menjaga stabilitas	a. Prinsip dasar kerjasama kedua negara b. Koordinasi penguatan aliansi (mekanisme koordinasi aliansi, peningkatan koordinasi operasional, perencanaan

	Timur) yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Jepang	perdamaian dan keamanan di area sekitar Jepang (<i>Situation in Area Surrounding Japan</i>) e. Program bilateral dalam membangun kerjasama pertahanan secara efektif di bawah mekanisme <i>Guidelines</i>	bilateral) c. Perlindungan perdamaian dan keamanan Jepang d. Kerjasama keamanan dan perdamaian regional dan global e. Kerjasama keamanan <i>space</i> dan <i>cyberspace</i> f. Kerjasama teknologi, pertukaran informasi intelejen
Ruang Lingkup Guidelines	Situasi Pada Saat Jepang Diserang	Situasi di Area Sekitar Jepang (<i>Situation in Area Surrounding Japan</i>)	Situasi Keamanan Global (sekitar Jepang, Asia Timur, Asia Pasifik dan lainnya)
Jangkauan Waktu	10 tahun	18 tahun	Berlaku sampai sekarang

<p>Alasan Terhentinya Guidelines</p>	<p>Untuk memperluas kerjasama pertahanan ketika tidak hanya pada situasi Jepang diserang dalam skema <i>Situation in Area Surrounding Japan</i> (SIASJ)</p>	<p>Munculnya tantangan isu keamanan baru dan perubahan konteks strategis dalam skema zona abu-abu (gray zone)</p>	
--------------------------------------	---	---	--

Tabel Perbandingan *US-Japan Defence Cooperation Guidelines* tahun 1978,1997, dan 2015.

Diolah Oleh : Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati, diakses melalui:

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12203/K.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>

